

Evaluasi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pada Pengrajin Tahu di Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang

Cynthia Utami Damayanti¹

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia
cynthiaud02@gmail.com

Leo Agustino²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia
leoagustino@untirta.ac.id

Ima Maisaroh³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia
ima.maisaroh@untirta.ac.id

ABSTRACT

This research focuses on the development program of the tofu industry sector in Lopang Village. One of the problems examined in this study is the lack of desire of tofu craftsmen in Lopang Village to attend training held by the Office of Cooperatives, SMEs, Industry and Trade of Serang City. This research aims to measure the success of the Small and Medium Industry Development Program (Case Study of Tofu Craftsmen in Lopang Village) using the CIPP theory by Daniel Stufflebeam (2003). This research uses descriptive qualitative methods by analyzing the results of interviews, observations, interviews, documentation and document studies. The results of this study indicate that based on the program evaluation proposed by Stufflebeam (2003), the SME development program case study of tofu craftsmen in Lopang Village has not fully achieved the objectives of the program caused by various factors. Overall, the existence of this program has not been able to increase the income of Lopang Village tofu craftsmen even though there have been changes in the packaging of tofu.

Keywords: *Small and Medium Industry Development, Program Evaluation, CIPP*

LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan derajat manusia dan masyarakat Indonesia yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pembangunan nasional mencakup aspek kehidupan bangsa dan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Aktor utama pembangunan ialah masyarakat, sementara pemerintah memiliki kewajiban membangun kondisi yang mendukung untuk menopang pembangunan nasional. Tugas masyarakat dalam pembangunan nasional, kuncinya dalam pembangunan ekonomi ialah Industri Kecil dan Menengah (IKM).

IKM adalah salah satu unggulan pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja, terutama di era setelah krisis moneter. IKM masih mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia, utamanya dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2022, jumlah IKM mencapai 4,4 juta unit usaha atau mayoritas 99,7 persen unit usaha industri di Indonesia (Sepanjang 2022, Kementerian Catat Sektor IKM Serap Tenaga Kerja Rp 12,39 Juta Orang, n.d.). Selanjutnya, kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat besar pada pendapatan negara maupun pendapatan daerah.

Tabel 1. Distribusi PDRB Industri Kecil dan Menengah Indonesia

Pulau	Tahun										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sumatera	18.42	18.46	18.65	18.69	18.59	18.49	18.46	18.33	18.05	18.12	18.59
Jawa	69.89	70.12	70.42	70.58	70.76	70.76	70.71	70.87	70.93	70.81	69.93
Bali	0.39	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.41	0.39	0.39	0.39	0.38
Nusa	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
Kalimantan	7.79	7.32	6.91	6.65	6.47	6.39	6.34	6.25	6.05	5.96	5.98
Sulawesi	2.25	2.45	2.38	2.43	2.52	2.72	2.87	2.93	3.36	3.54	3.87
Maluku	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14	0.14	0.18
Papua	0.92	0.95	0.93	0.94	0.92	0.91	0.89	0.87	0.88	0.83	0.86

Sumber: BPS (Maharani, 2022)

Berdasarkan perannya yang sangat besar dalam menopang perekonomian suatu negara, maka dari itu pengembangan IKM perlu menjadi atensi pemerintah. Dalam rangka untuk melaksanakan pengembangan IKM, Pemerintah Kota Serang telah memberlakukan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. Fasilitas pengembangan usaha yang dimaksud dalam peraturan itu ialah dalam bidang: 1) produksi dan pengolahan; 2) pemasaran; 3) sumber daya manusia; 4) manajemen usaha mikro; dan 5) desain dan teknologi (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, n.d.). Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan jaminan hukum dalam pemberdayaan dan pengembangan IKM di Kota Serang.

Kota Serang adalah Ibu Kota Provinsi Banten, artinya seluruh kegiatan pemerintahan berada dalam satu wilayah yang sama yaitu Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Lokasi Kota Serang yang dekat dengan pintu masuk dan keluar Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, potensi pembangunan kawasan industri padat modal dan skala besar di kawasan Kota Cilegon, serta potensi usaha skala besar di Tangerang dan sekitarnya. Artinya, Kota Serang berpotensi menjadi pusat pertukaran barang dan jasa bagi titik-titik pertumbuhan di sekitarnya.

Perkembangan kawasan tempat tinggal di Kota Serang saat ini adalah pengaruh perkembangan ekonomi di titik-titik pertumbuhan tersebut, yang dapat menjadi pertanda kemungkinan pertumbuhan sektor IKM.

Tabel 2. Rekapitulasi Data Jenis Sektor Usaha di Kota Serang Tahun 2022

No.	Uraian	2022
1	Pertanian dan Penggalian	891
2	Industri Pengolahan	997
3	Listrik, Gas dan Air	98
4	Konstruksi	472
5	Perdagangan dan Eceran	10.891
6	Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	690
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	107
8	Perantara Keuangan	179
9	Real Estate dan Usaha Persewaan	168
10	Jasa Pendidikan	-
11	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115
12	Jasa Kemasyarakatan, Sosial budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-
13	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah	172
Jumlah		14.780

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang (2022)

Peneliti akan memusatkan penelitian ini pada sektor industri pengolahan karena adanya potensi industri pengolahan adalah pelaku industri pengolahan akan bisa membuat barang-barang bernilai tambah tinggi yang berdaya saing jauh lebih banyak dan diminati pelanggan di dalam negeri maupun luar negeri (Hari Sulistiyo, 2020). Salah satu komoditi potensial pada cabang industri pengolahan adalah tahu, hal ini karena konsumen tahu sangat luas, mencakup semua kelas sosial. Salah satu industri tahu terbesar di Kota Serang adalah industri tahu di Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang.

Tabel 3. Sebaran Pengrajin Tahu di Kota Serang 2022

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Per Kecamatan
1	Serang	Lopang	35
		Cimuncang	3
		Kaligandu	1
2	Walantaka	Cigoong	4
		Pipitan	1
3	Curug	Curug	3
		Manis	
		Curug	1
4	Cipocok Jaya	Karundang	3
		Cipocok	1
5	Kasemen		-
6	Taktakan		-
Jumlah			52

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang (2022)

Pada pelaksanaan program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ini tidak ada batasan waktunya, yang mana setiap tahun agen pelaksana selalu melakukan pengamatan dan penilaian pada pelaku usaha mikro khususnya pengrajin tahu Kelurahan Lopang dengan dilakukannya pendataan, walaupun tidak semua pengrajin tahu mendapatkan pengembangan industri berupa pelatihan dan pendampingan. Ditambah lagi, harga kedelai impor yang naik turun, hal ini menyebabkan pengrajin tahu di Kelurahan Lopang Kota Serang rawan mendapatkan permasalahan dalam mengembangkan usahanya.

Pemerintah sudah membentuk koperasi sebagai usaha untuk mengembangkan sentra IKM yang diperbarui di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang pengkoperasian. Berdirinya KOPTI Kota Serang bertujuan untuk menampung segala harapan produsen tempe dan tahu dan menjadi wadah dalam pengembangan industri tempe dan tahu selain menjalankan usahanya sebagai penyalur kedelai untuk memenuhi kebutuhan produksi anggota produsen tempe dan tahu. Kemudian, dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mengembangkan industri tempe dan tahu baik dalam hal pemasaran dan kemudahan akses pasar dan promosi produk.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dan kemudian bertemu dengan pihak DinkopUKMPerindag Kota Serang, beliau menuturkan bahwa pada perkembangan industri tahu Kelurahan Lopang masih terdapat masalah yaitu dari segi kualitas sumber daya manusia pengrajin tahu masih rendah dan rendahnya pertumbuhan industri tahu sangat dipengaruhi oleh naik turunnya harga kedelai. Peneliti memilih topik penelitian ini karena berdasarkan hasil pengamatan di atas dapat diketahui

bahwa potensi industri pengolahan tahu di Kelurahan Lopang belum tergarap secara maksimal.

Selanjutnya peneliti menemukan bahwa dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Tahun 2022 (Studi Kasus Pada Pengrajin Tahu di Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang) masih terdapat beberapa masalah yaitu: Pertama, belum adanya tempat pembuangan limbah dari proses pembuatan tahu. Pada saat proses perebusan kedelai masih dilakukan dengan menggunakan tungku sederhana. Kondisi seperti ini, menyebabkan pengrajin tahu sering mendapatkan teguran negatif dari warga sekitar karena asap yang dihasilkan tersebar sampai daerah sekitar, apalagi proses pembuatan tahu dilakukan pada saat masyarakat masih beraktivitas di pagi dan siang hari.

Ditambah dengan semrawutnya kondisi lingkungan di sekitar industri pengolahan tahu. Pasalnya, lokasi industri pengolahan tahu berada di pemukiman padat penduduk. Sejalan dengan hal itu, pada media Youtube (PART 1 - Perjuangan Kang Asep, membantu membangkitkan UMKM Lokal Produsen Tempe dan Tahu - YouTube, 2022) mengungkapkan bahwa KOPTI pernah mengajukan audiensi kepada Pemerintah Daerah agar segera direlokasi ke tempat yang lebih layak.

Kedua, belum adanya bantuan peralatan produksi tahu yang modern. Berdasarkan observasi awal dan kemudian peneliti bertemu dengan salah satu pengrajin tahu yang menjelaskan bahwa peralatan yang masih digunakan oleh pengrajin tahu di Kelurahan Lopang masih sederhana seperti hawu (kompor tradisional) dan saringan kain. Beliau ingin mendapatkan kemudahan untuk meningkatkan alat produksi agar produksi tahu meningkat dan lebih higienis.

Gambar 1. Proses Pembuatan Tahu



Sumber: Peneliti (2023)

Ketiga, kurangnya keinginan pengrajin tahu untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh DinkopUKMPerindag Kota Serang. Berdasarkan observasi awal dan kemudian bertemu dengan salah satu anak pengrajin tahu yang bernama Bu Diah

menjelaskan bahwa KOPTI Kota Serang sudah menggelar pelatihan mengenai pembukuan namun sebagian besar warga kurang tertarik akan adanya pelatihan tersebut. Banyak pengrajin tahu yang masih menganggap bahwa pembukuan ini tidak terlalu penting.

Keempat, kurangnya akses permodalan bagi pengrajin tahu dalam keberlangsungan usaha. Modal pengrajin tahu berasal dari uang pribadi dan belum pernah menerima pinjaman modal dari Koperasi. Ketika modal pribadi kurang untuk membayar pegawai dan membeli bahan baku pengrajin merasa kesulitan. Di sisi lain dalam sudut pandang bantuan dana dari pemerintah, berdasarkan observasi awal peneliti menemukan bahwa belum meratanya bantuan dari pemerintah yang diterima oleh masyarakat.

Kelima, kurang memberikan fasilitasi promosi pada pengrajin tahu. Tidak adanya bantuan penggunaan media sosial yang DinkopUKMPerindag Kota Serang untuk menunjang penjualan. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh DinkopUKMPerindag Kota Serang hanya pada event tahunan seperti Serang Fair 2019. Website. Pemerintah Kota Serang dan DinkopUKMPerindag Kota Serang pun tidak dimanfaatkan sebagai sarana promosi. Berdasarkan hasil pemaparan di atas, artikel ini akan menganalisis mengenai Evaluasi Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Tahun 2022 (Studi Kasus Pada Pengrajin Tahu Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang).

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Tahir, 2020, p.14) merupakan apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (Public policy is whatever governments choose to do or not to do). Dalam definisi seperti ini, maka pusat perhatian kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan "sesuatu yang tidak dilakukan" oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama dengan "sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah".

Pada prosesnya kebijakan publik memiliki sebuah tahapan yang saling terkait satu sama lain. Sehingga apabila tahapan tersebut hilang salah satunya, maka tentunya akan mempengaruhi kebijakan publik itu sendiri. Berikut tahapan dari kebijakan publik menurut William Dunn (dalam Anggara, 2014, p. 172) meliputi: perumusan masalah (penyusunan agenda), peramalan (formulasi kebijakan), rekomendasi (adopsi kebijakan), pemantauan (monitoring), dan penilaian/evaluasi (penilaian kebijakan).

Tinjauan tentang Evaluasi Program

Evaluasi program adalah rancangan kegiatan yang membentuk suatu sistem yang saling berkaitan satu sama lain mengenai kualitas program dengan melibatkan lebih dari satu orang dalam pelaksanaannya. Evaluasi Program menurut Stufflebeam harus meliputi 4 kriteria mencakup Evaluasi Konteks (Context), Evaluasi Masukan (Input), Evaluasi Proses (Process), dan Evaluasi Hasil (Product). Pertama, Evaluasi Konteks (Context); menilai kebutuhan, masalah dan peluang dalam lingkungan yang telah ditentukan. Evaluasi ini membantu evaluator untuk menentukan dan menilai suatu tujuan dan kemudian merujuk kebutuhan yang dinilai dari penerima manfaat untuk menilai program tersebut. Kedua, Evaluasi Masukan (Input); menilai strategi bersaing dan rencana kerja sekaligus anggaran dari pendekatan yang dipilih untuk implementasi.

Ketiga, Evaluasi Proses (Process); memantau, mendokumentasikan, dan menilai kegiatan dari program. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik tentang seberapa baik staf melakukan kegiatan yang direncanakan seperti yang direncanakan dan seefisien yang direncanakan. Keempat, Evaluasi Hasil (Product); mengidentifikasi dan menilai hasil jangka pendek maupun jangka panjang ataupun hasil yang diinginkan dan tidak diinginkan. Alasan peneliti menggunakan teori CIPP adalah karena model ini memberikan sebuah gambaran yang detail, jelas dan luas terhadap suatu program mulai dari konteksnya hingga saat proses penerapan/implementasi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan observasi (interview), wawancara, dokumentasi dan studi dokumen. Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DinkopUKMPerindag) Kota Serang serta lokasi pengrajin Tahu Kelurahan Lopang, Kota Serang.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DinkopUKMPerindag) Kota Serang, Pendamping UMKM Kecamatan Serang, Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia (KOPTI) Provinsi Banten, pengrajin tahu Kelurahan Lopang, akademisi, masyarakat setempat dan pedagang tahu Kelurahan Lopang. Peneliti menggunakan model analisis data Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2016, p. 246), yang menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Konteks (Context)

Menurut Stufflebeam (2003), evaluasi konteks menilai kebutuhan program dan kesesuaian tujuan dengan sasaran program. Dari segi kebutuhan kegiatan, masih minimnya anggaran yang tersedia sehingga membuat pihak pelaksana terbatas dalam membuat kegiatan program pengembangan IKM. Misalnya pada rencana kerja DinkopUKMPerindag Kota Serang Tahun 2022 hanya terdapat 1 kegiatan pelatihan dengan 3 sub kegiatan pelatihan yaitu pelatihan makanan, pelatihan kerajinan dan pelatihan sertifikasi halal. Khusus untuk pengrajin tahu mendapatkan 2 pelatihan yaitu pelatihan makanan dan pelatihan sertifikasi halal.

Dalam konteks, tujuan adalah rencana yang dibutuhkan dan diterapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam implementasi kegiatan pelatihan, DinkopUKMPerindag Kota Serang memiliki tujuan yang sesuai dengan tujuan program pengembangan IKM yaitu meningkatkan komoditas para pelaku IKM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Tujuan tersebut sesuai dengan pasal 4 (c) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro diantaranya menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pada proses penyusunan rencana program pengembangan IKM di Kota Serang telah menerapkan dua konsep pendekatan yaitu top-down dan bottom-up. Namun, bagian top-down lebih mendominasi, terlihat pada kegiatan pelatihan makanan yang diberikan pada pengrajin tahu hanya direncanakan oleh pihak pemerintah saja. Sehingga, pelatihan yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengrajin tahu.

B. Evaluasi Masukan (Input)

Indikator masukan program dapat berjalan dengan baik ketika strategi dan rencana kerja sudah terstruktur dengan baik, serta tersedianya anggaran yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan industri tahu. Dari segi strategi kegiatan, DinkopUKMPerindag Kota Serang mengklaim sudah memiliki staf yang berpengalaman dalam bidang perindustrian. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, narasumber pada pelatihan makanan pada tahun 2022 adalah merupakan pegawai non PNS DinkopUKMPerindag Kota Serang, yang mempunyai usaha makanan. Berdasarkan dokumen rencana kerja, peneliti menemukan data berikut:

Tabel 4. Jumlah SDM dengan Kesesuaian Pendidikan di DinkopUKMPerindag Kota Serang

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2	13 orang
2.	Strata 1	19 orang
3.	D.III	1 orang
4.	SLTA	2 orang
5.	Non PNS	63 orang
Jumlah		98 orang

Sumber: DinkopUKMPerindag Kota Serang (2022)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara jumlah pegawai PNS dan pegawai non PNS. Pegawai PNS berjumlah 35 orang sedangkan pegawai non PNS berjumlah 63 orang. Walaupun begitu, non PNS yang diterima sesuai kompetensinya dan ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Kemudian, DinkopUKMPerindag Kota Serang sudah menjalin kerja sama dengan Bank BJB dalam hal permodalan, Dinas Pertanian dalam hal narasumber kegiatan pelatihan, UNTIRTA kerja sama dalam mengawetkan ikan bandeng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kerja sama dalam pembuatan NIB, Dinas Perindustrian Provinsi Banten dan Kementerian Perindustrian kerja sama dalam hal kuota peserta kegiatan sesuai dengan kebutuhan IKM. Selain itu, bidang perindustrian juga selalu berkolaborasi dengan bidang UMKM dan bidang Perdagangan di DinkopUKMPerindag Kota Serang. Adanya kerja sama dengan pihak lain dilakukan untuk menghemat pengeluaran anggaran yang tersedia.

Dari segi rencana kerja, berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan bahwa terdapat ketidakjelasan standar operasional prosedur (SOP) dalam program pengembangan IKM. Hal ini disampaikan oleh staf bidang perindustrian bahwa belum terdapat SOP secara tertulis dalam program pengembangan IKM, hanya terdapat mekanisme pelaksanaan di lapangan. IKM dapat mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh DinkopUKMPerindag Kota Serang dengan syarat mempunyai legalisasi usaha.

Sub indikator anggaran menilai evaluasi program berdasarkan sumber dari anggaran yang digunakan serta kecukupan anggaran yang tersedia pada program pengembangan IKM pada pengrajin tahu Kelurahan Lopang. Pertama, terkait sumber dari anggaran yang digunakan. Anggaran untuk menjalankan program pengembangan IKM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang. Kedua, terkait kecukupan anggaran program. Anggaran yang digunakan untuk pengembangan industri kecil dan menengah pada pengrajin tahu dinilai kurang mencukupi sedangkan kebutuhan pelaku industri khususnya pengrajin tahu sangatlah banyak, mulai dari bantuan produksi seperti bantuan peralatan sampai pemasarannya

seperti pelatihan digital marketing yang pernah diselenggarakan oleh DinkopUKMPerindag Kota Serang pada tahun sebelumnya.

Hasil penelitian berjudul Evaluasi Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah di Kabupaten Ponorogo mengungkapkan bahwa anggaran yang diterima berakibat pada jumlah dan durasi penyelenggaraan kegiatan (Iskandar et al., 2017:20). Selain itu, hasil penelitian Sukatno (2016:149) yang berjudul Implementasi Program Pengembangan Sentra Industri Kecil Tas di Kecamatan Petir, sumber anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam pelaksanaan pengembangan sentra industri kecil tas di Kabupaten Serang. Dengan alokasi anggaran yang terbatas, diperlukan perencanaan yang efisien dan efektif dalam menentukan pelatihan apa yang dibutuhkan para pelaku IKM selama satu tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan IKM khususnya kebutuhan para pengrajin tahu Kelurahan Lopang.

C. Evaluasi Proses (Process)

Menurut Stufflebeam (2003), evaluasi proses menilai masalah yang terdapat pada tahap proses dari hambatan program pengembangan IKM pada pengrajin tahu Kel. Lopang. Pada sub indikator pelaksanaan kegiatan, DinkopUKMPerindag Kota Serang belum melakukan pelatihan secara menyeluruh kepada para pelaku IKM khususnya pada industri tahu. Sebagian besar pengrajin tahu di Kelurahan Lopang belum mendapatkan pelatihan. Hal tersebut dikarenakan peserta yang mengikuti pelatihan dipilih berdasarkan usulan dari tenaga pendamping. Sehingga peserta dalam kegiatan pelatihan selalu dengan orang yang sama. Selain itu, pelatihan tersebut masih jarang diselenggarakan hanya 2-3 kali saja dalam setahun serta pelatihan yang diberikan kurang sesuai dengan kebutuhan IKM khususnya pengrajin tahu yang mana dalam pelaksanaan pelatihan hanya berisi materi saja, padahal banyak pelaku IKM yang dapat memperoleh manfaat dari pemberian praktek.

Sub indikator hambatan kegiatan menilai evaluasi program berdasarkan hambatan-hambatan yang ditemukan pada saat pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan hambatan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah pada pengrajin tahu Kelurahan Lopang yaitu: Pertama, masih terkendala dengan anggaran yang terbatas. Kedua, adanya perbedaan pendapat antar petugas. Perbedaan pendapat antar petugas bisa dijadikan sebagai media untuk melaksanakan perbaikan atau perubahan strategi untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Ketiga, berdasarkan hasil wawancara kepada informan, hambatan dalam program pengembangan IKM adalah karena kebijakan atasan yang berbeda-beda. Hasil penelitian berjudul Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Pemerintah Kota Batam mengungkapkan bahwa gaya

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Pemerintah Kota Batam (Kusumayanti et al., 2020). Pemimpin yang memberikan semangat atau dorongan kepada pegawainya dapat menyumbang kinerja yang efektif dan produktif. Intinya, semakin baik kepemimpinan maka dapat meningkatkan kinerja yang baik.

Keempat, menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, terdapat informan yang mengatakan bahwa tidak adanya kekurangan SDM dalam program pengembangan industri kecil dan menengah pada pengrajin tahu Kelurahan Lopang. Namun berdasarkan studi dokumen, peneliti menemukan bahwa tenaga pendamping yang dimiliki oleh DinkopUKMPerindag Kota Serang dari segi kuantitas masih terbilang sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah industri yang mencapai ribuan sementara tenaga pendamping yang dimiliki di setiap kecamatan hanya berjumlah satu orang di Kota Serang. Hanya terdapat 2 pendamping IKM di Kota Serang. Satu orang pendamping IKM bertugas di bagian pendataan lapangan, sedangkan satunya bertugas sebagai operator.

Kelima, kurangnya partisipasi pengrajin tahu untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Hal ini dikarenakan kesibukan pengrajin tahu yang harus memproduksi tahu dan berjualan. Selain itu, pengrajin tahu menyadari bahwa kebutuhan para pengrajin bukan lagi pelatihan, melainkan bantuan peralatan, sehingga banyak para pengrajin tahu yang enggan menghadiri pelatihan yang diadakan oleh DinkopUKMPerindag Kota Serang.

D. Evaluasi Hasil (Product)

Menurut Stufflebeam (2003), evaluasi produk menilai sampai sejauh mana program yang dilaksanakan tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya. Merujuk pada hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan program pengembangan industri tahu di Kelurahan Lopang pada indikator hasil kegiatan sudah sesuai dengan teori CIPP, pelaksanaan kegiatan pelatihan telah mendekati harapan yang sebelumnya tertulis pada perencanaan kegiatan. Dengan adanya kegiatan pelatihan menyebabkan terjadinya perubahan kemasan produk tahu yaitu menggunakan mika dan box plastik. Namun, kegiatan pelatihan belum berhasil meningkatkan pendapatan pengrajin tahu di Kelurahan Lopang karena mayoritas pembeli di pasar lebih memilih kemasan berbahan plastik dengan alasan lebih ekonomis.

KESIMPULAN

Menurut hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2022 (Studi Kasus Pengrajin Tahu Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang) belum sepenuhnya dapat mencapai tujuan dari program. Hal tersebut dinilai

berdasarkan komponen-komponen pada model evaluasi program CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam (2003) yang dapat dirincikan sebagai berikut: Pertama, Dimensi Context, pada aspek kebutuhan masih minimnya anggaran yang dimiliki oleh bidang perindustrian DinkopUKMPerindag Kota Serang sehingga hal tersebut berdampak pada penyelenggaraan kegiatan untuk IKM naik kelas. Pada aspek tujuan telah sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2015 tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, namun kegiatan pelatihan yang diberikan belum sesuai dengan pengrajin tahu Kelurahan Lopang.

Kedua, Dimensi Input, pada aspek strategi kegiatan sudah baik karena sudah menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk menghemat anggaran yang dikeluarkan. Pada aspek rencana kerja terdapat ketidakjelasan SOP tertulis, hanya terdapat mekanisme pelaksanaan di lapangan. Pada aspek anggaran, kurang mencukupi anggaran untuk program pengembangan IKM. Ketiga, Dimensi Process, masih terdapat kendala yaitu terkendala anggaran yang terbatas, adanya perbedaan pendapat antar petugas, kebijakan atasan yang berbeda-beda, kekurangan tenaga pendamping IKM, dan kurangnya partisipasi pengrajin tahu Kelurahan Lopang untuk mengikuti pelatihan. Keempat, Dimensi Product, dinyatakan bahwa belum cukup baik karena belum meningkatkan pendapatan pengrajin tahu Kelurahan Lopang walaupun telah terjadi perubahan kemasan produk tahu menggunakan mika dan box plastik.

REFERENSI

Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. In Pustaka Setia Bandung.
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Hari Sulistiyo, R. A. K. P. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1).

Maharani, E. R. (2022). DAMPAK PEMBANGUNAN SENTRA IKM MENGGUNAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BANYAKNYA INDUSTRI KECIL MENENGAH DI INDONESIA. 2, 238–255.

PART 1 - Perjuangan Kang Asep, membantu membangkitkan UMKM Lokal Produsen Tempe dan Tahu - YouTube. (2022, Agustus 24). Arah Official.
<https://www.youtube.com/watch?v=8s45up1hMJg>

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro. (n.d.). Diambil 19 Desember 2022, dari
<https://jdih.serangkota.go.id/dokumen/detail/peraturan-daerah-nomor-3-tahun-2015>

Sepanjang 2022, Kementerian Catat Sektor IKM Serap Tenaga Kerja Rp 12,39 Juta

Orang. (n.d.). Diambil 22 Februari 2023, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2022-kementerian-catat-sektor-ikm-serap-tenaga-kerja-rp-1239-juta-orang>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.

Tahir, A. (2020). *Kebijakan Publik dan Good Governancy*. <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/6523/arifin-tahir-kebijakan-publik-dan-ood-governancy.html>